

---

**Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Instrumen Kebijakan Publik: Studi Implementasi Di Desa Jatimulyo****<sup>1</sup>Laily Purnawati S.IP, M.Si, <sup>2</sup>Ely Via Bustanul Nurhalisha, <sup>3</sup>Miladatur Rosidah Laila****<sup>4</sup>Nur Fajar Wahyu Ningtyas, <sup>5</sup>Alvin Aditya Kurniawan**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tulungagung

Email: [halishanew48@gmail.com](mailto:halishanew48@gmail.com)

---

**Abstract**

*The Free Nutritious Meal (MBG) Program is a government policy that aims to improve children's nutritional status and overcome the problem of malnutrition in Indonesia. Apart from being a nutrition intervention, this program also has the potential to encourage community empowerment and strengthen the local economy. This study aims to analyze the implementation of the MBG Program in the Nutrition Fulfillment Service Unit (SPPG) of Jatimulyo Village, Kauman District, Tulungagung Regency, and identify the obstacles faced in its implementation. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out using the Merilee S. Grindle policy implementation model which emphasizes the aspects of affected interests, types of benefits, implementers, and availability of resources. The results of the study show that the implementation of MBG in Jatimulyo Village has gone quite well with adequate resource support, especially funding. This program has a positive impact on the fulfillment of child nutrition and the economic activities of the village community, although there is still a need to improve facilities, implementation competence, and supervision so that the program can run more optimally and sustainably.*

**Sejarah Artikel**


Diterima: 6-12-2025

Ditinjau: 20-1-2026

Disetujui: 15-2-2026

**Keywords:** *Free Nutritious Meal Program; Policy Implementation; Model Merilee S. Grindle; Nutritional Fulfillment; Community Empowerment*

**How to Cite**<sup>1</sup>Laily Purnawati S.IP, M.Si, <sup>2</sup>Ely Via Bustanul Nurhalisha, <sup>3</sup>Miladatur Rosidah, Laila <sup>4</sup>Nur Fajar Wahyu Ningtyas, <sup>5</sup>Alvin Aditya Kurniawan. (2026). Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Instrumen Kebijakan Publik: Studi Implementasi Di Desa Jatimulyo. *Governance (Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik)*, vol 16 (No 01).

 <https://doi.org/10.38156/gjkmp.v16i1.406>**PENDAHULUAN**

Program makan bergizi gratis di sekolah merupakan salah satu kebijakan krusial dalam usaha untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan anak-anak di Indonesia serta memastikan akses merata terhadap nutrisi berkualitas bagi para pelajar (Nissa et al., 2025). Program ini sudah diusulkan oleh pasangan Prabowo dan Gibran pada saat kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden 2025 Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2025.

Program ini dimulai pada Senin, 6 Januari 2025, melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dijalankan secara bertahap sesuai dengan jadwal masuk siswa di sekolah (Sari et al., 2025). Pemerintah menargetkan pemberian Makan Bergizi Gratis kepada 15 sampai 20 juta penerima manfaat tahun ini, yang mencakup peserta didik mulai dari jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui (Harsono, 2025).

Masalah ketidakamanan pangan menjadi isu mendesak di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Sekitar 25% populasi Indonesia mengalami kesulitan dalam mengakses makanan yang cukup dan bergizi (Impacts et al., n.d.). Malnutrisi menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti stunting, kekurangan gizi, dan perkembangan kognitif yang terganggu, yang berdampak negatif pada produktivitas dan perkembangan ekonomi (Impacts et al., n.d.).

Penelitian yang dilakukan oleh Suprpto menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan memberikan makanan bergizi gratis kepada populasi yang kurang terlayani, terutama anak-anak, dan lansia. MBG merupakan bagian dari strategi lebih luas untuk mengatasi ketidakamanan pangan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mempromosikan kesetaraan sosial-ekonomi (Suprpto et al., 2025).

Lain halnya yang dikatakan oleh Wahyu Trisno Aji dimana artikelnya bertujuan untuk menjelaskan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Makan Siang Gratis yang menjadi visi misi andalan dari presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran (Aji et al., 2025).

Namun, pelaksanaan program ini menghadapi banyak tantangan seperti keterbatasan dana operasional yang membuat program sulit berjalan dengan lancar. Selain itu, orang yang memasak juga harus punya kualifikasi khusus tidak sembarangan orang, pelayanan yang diberikan juga belum sesuai dengan harapan masyarakat, jumlah penerima manfaat dan Unit Pelayanan Publik (SPPG) yang ikut program masih jauh dari target yang diinginkan (Dieu et al., 2023). Selain itu, belum ada aturan hukum yang jelas untuk menjamin semua orang bisa mengakses program ini dan memastikan makanan yang diberikan aman. Serta pengawasan terhadap pelaksanaan program juga masih lemah dan tidak adanya prosedur kerja yang jelas membuat pelaksanaan program kurang efektif (Mubarok et al., 2020). Kesenjangan ini telah mengakibatkan insiden seperti keracunan makanan dan penyebaran penyakit, serta ketidakpuasan masyarakat, yang menunjukkan bahwa tata kelola program dan sistem penjaminan mutu masih belum berkembang (Suprpto et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.

Analisis kebijakan ini berdasarkan teori Model Marille S.Grindle yang mana ada enam pilar sebagai alat analisis seperti kepentingan yang terpengaruh, jenis manfaat, derajat perubahan, kedudukan policy maker, siapa pelaksananya, sumber daya dan konteks kebijakannya (Prihatin et al., 2021).

Beberapa penelitian internasional menunjukkan bahwa program pemberian makanan gratis di sekolah memiliki dampak signifikan terhadap status gizi dan partisipasi belajar anak, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas implementasi dan sistem pengawasan. (Desalegn et al., 2021) menekankan bahwa tantangan utama program feeding

adalah keamanan pangan, konsistensi kualitas makanan, serta keterlibatan aktor lokal. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian di Desa Jatimulyo, di mana kendala utama bukan terletak pada tujuan kebijakan, melainkan pada aspek teknis implementasi dan kapasitas pelaksana. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya sekaligus memberikan konteks empiris baru pada implementasi MBG di tingkat desa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola, pengawasan, dan prosedur operasional, sehingga program MBG dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi warga Desa Jatimulyo dan sekitarnya.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung di lapangan dengan pihak terkait serta diperkuat dengan kajian jurnal dan artikel ilmiah yang sesuai dengan fokus penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif (Fadli, 2021). Penelitian ini dilakukan di SPPG Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, karena SPPG ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Tulungagung bagian barat dengan cakupan 42 tempat atau 2.148 porsi, meliputi berbagai satuan pendidikan dan kelompok sasaran program. Selain itu, SPPG Jatimulyo memiliki peran strategis dalam proses perencanaan, pendistribusian, hingga pengawasan pelaksanaan program MBG, sehingga lokasi ini dinilai relevan dan representatif untuk dijadikan objek penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Adolph, 2016). Narasumber penelitian meliputi kepala SPPG Jatimulyo, koordinator Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta petugas pelaksana yang terlibat langsung dalam program, dengan teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*. Analisis data dilakukan melalui metode triangulasi untuk menjamin keabsahan data dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari berbagai sumber. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program MBG. Informan utama terdiri dari kepala SPPG, koordinator program, dan tenaga pelaksana dapur karena memiliki pengetahuan operasional dan kebijakan secara langsung. Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap, dimulai dari observasi awal, dilanjutkan dengan wawancara mendalam, dan diperkuat dengan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, penelitian ini disusun dengan beberapa proposisi teoretis sebagai berikut:

Proposisi 1: Implementasi Program Makan Bergizi Gratis akan berjalan efektif apabila kepentingan aktor yang terdampak, termasuk pelaku ekonomi lokal, dapat diakomodasi secara memadai.

Proposisi 2: Kejelasan manfaat dan kualitas hasil kebijakan berpengaruh langsung terhadap tingkat dukungan masyarakat terhadap Program MBG.

Proposisi 3: Keterbatasan kapasitas pelaksana dan sarana pendukung berpotensi menghambat derajat perubahan yang diharapkan dari kebijakan MBG.

Proposisi-proposisi ini digunakan sebagai panduan analisis dalam mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori Grindle.

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Jatimulyo dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang mencakup enam indikator utama, yaitu kepentingan yang terpengaruh, jenis manfaat, derajat perubahan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, serta sumber daya dan konteks kebijakan.

### 1) Kepentingan yang Terpengaruh

Program MBG bertujuan meningkatkan kecukupan gizi anak usia sekolah sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal. Sasaran program meliputi peserta didik SDN, MI, TK, Posyandu, dan Kelompok Belajar (KB) (Jurnal et al., 2025), dengan harapan dapat mendukung tumbuh kembang anak dan menekan angka stunting (Septariana et al., n.d.).

Namun, hasil wawancara menunjukkan adanya dampak ekonomi bagi pemilik kantin sekolah, berupa penurunan pendapatan akibat berkurangnya pembelian makanan oleh siswa. Sebelum program MBG, pendapatan kantin dapat mencapai lebih dari Rp100.000 per hari, sedangkan setelah program berjalan angka tersebut sulit dicapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepentingan sebagian aktor lokal belum sepenuhnya terakomodasi.

Sesuai pandangan Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan kebijakan dalam mengakomodasi kepentingan aktor terdampak. Oleh karena itu, pelibatan pedagang kantin sebagai penyedia bahan pangan lokal atau bagian dari tim pengolah makanan MBG dapat menjadi solusi untuk meminimalkan resistensi pasif terhadap kebijakan.

### 2) Jenis Manfaat

Grindle menekankan bahwa manfaat kebijakan yang jelas dan dirasakan langsung akan meningkatkan dukungan publik. Program MBG dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar yang ditetapkan oleh ahli gizi Badan Gizi Nasional (Asclepius, 2024).

Namun, adanya kasus keracunan makanan di beberapa daerah menunjukkan bahwa manfaat kebijakan dapat berkurang apabila aspek keamanan pangan tidak dikelola secara optimal. Dalam kerangka Grindle, hal ini mencerminkan persoalan pada kualitas implementasi, bukan pada tujuan kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan mutu, kebersihan, dan keamanan pangan menjadi prasyarat utama agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran.

### 3) Derajat Perubahan

Derajat perubahan yang diharapkan dari Program MBG tergolong tinggi karena mengubah pola konsumsi anak sekaligus sistem penyediaan makanan di sekolah. Berdasarkan wawancara dengan pengelola SPPG, perubahan ini menghadapi kendala teknis berupa keterbatasan waktu dan lamanya proses pengolahan makanan dalam skala besar.

Menurut Grindle, semakin besar perubahan yang dituntut kebijakan, semakin tinggi pula tantangan implementasinya. Keterbatasan peralatan dapur menjadi faktor penghambat utama. Oleh karena itu, penggunaan peralatan dapur modern dan efisien, sebagaimana diterapkan di beberapa negara lain, menjadi solusi strategis untuk menyesuaikan kapasitas implementasi

dengan target perubahan kebijakan tanpa mengorbankan kualitas dan keamanan pangan (Islam & Azhar, 2025).

#### 4) Kedudukan Policy Maker

Program MBG di Desa Jatimulyo memperoleh dukungan kuat dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional, serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat desa. Dukungan ini tercermin dari keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengolahan dan distribusi makanan.

Dalam perspektif Grindle, legitimasi dan posisi kuat pembuat kebijakan berkontribusi pada kelancaran implementasi. Selain itu, program MBG juga menciptakan efek multiplikasi ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan UMKM dan petani lokal, sehingga memperkuat dukungan sosial dan politik terhadap keberlanjutan kebijakan (Budiman & Liyong, 2023).

#### 5) Pelaksana Kebijakan

Pelaksana Program MBG di Desa Jatimulyo terdiri atas yayasan, mitra dapur, dan tenaga pengolah makanan yang berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional. Dalam model Grindle, kapasitas dan kompetensi pelaksana menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya keterbatasan pada kualitas peralatan masak dan kompetensi tenaga pengolah makanan yang belum sepenuhnya memperoleh pelatihan khusus. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan dan penerapan standar rekrutmen yang lebih ketat.

#### 6) Sumber Daya dan Konteks Kebijakan

Dalam model Grindle, *resources committed* merupakan aspek penting keberhasilan kebijakan. Pada Program MBG di Desa Jatimulyo, ketersediaan sumber daya, khususnya pendanaan, dinilai cukup memadai (Grindle & Lamongan, 2026).

Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel menunjukkan bahwa aspek sumber daya finansial telah terpenuhi dengan baik. Hal ini sejalan dengan pandangan Grindle bahwa kebijakan akan berjalan optimal apabila didukung oleh sumber daya finansial, manusia, dan sarana yang memadai. Dengan demikian, konteks kebijakan MBG di Desa Jatimulyo dapat dikatakan kondusif bagi tercapainya tujuan pemenuhan gizi anak secara berkelanjutan (Nur et al., 2023).

Jika dibandingkan dengan pelaksanaan program feeding di daerah lain, tantangan yang dihadapi Desa Jatimulyo menunjukkan pola yang relatif serupa, terutama terkait keamanan pangan dan kapasitas pelaksana (Suprpto et al., 2025). Perbedaannya terletak pada stabilitas dukungan pendanaan. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan anggaran saja belum cukup tanpa diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang memadai.

Secara empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh aspek finansial, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan dalam mengakomodasi

aktor lokal dan menjaga kualitas implementasi. Temuan ini memperkaya penerapan model Grindle dalam konteks kebijakan gizi di tingkat desa, yang masih relatif terbatas dalam literatur kebijakan publik di Indonesia.

## SIMPULAN

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Jatimulyo pada intinya telah dilaksanakan dengan baik dan memberikan pengaruh positif bagi pemenuhan gizi anak serta pemberdayaan masyarakat. Inisiatif ini berhasil meningkatkan kesehatan siswa dan sekaligus menciptakan peluang kerja bagi warga desa yang terlibat dalam proses pengolahan dan distribusi makanan.

Dengan menggunakan analisis Model Merilee S. Grindle, terungkap bahwa meskipun keuntungan dari program ini cukup signifikan, pelaksanaannya masih mengalami beberapa masalah, seperti penurunan pendapatan dari kantin sekolah, kualitas peralatan yang belum memadai, serta tenaga pengolah makanan yang memerlukan pelatihan lanjutan. Selain itu, aspek keamanan pangan juga harus diwaspadai secara serius mengingat masih ada potensi keracunan makanan pada anak-anak.

Walaupun demikian, dukungan finansial dari pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dianggap cukup memadai dan dapat mendukung kelancaran program. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan mutu, dan kolaborasi antaraktor merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa tujuan utama program, yaitu penyediaan makanan yang aman, bergizi, dan berkualitas untuk anak-anak, dapat tercapai dengan optimal.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan standar keamanan pangan, pelibatan pelaku ekonomi lokal secara lebih inklusif, serta penguatan kapasitas pelaksana melalui pelatihan berkelanjutan. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas Program MBG sebagai instrumen kebijakan publik jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, W. T., Studies, I. I., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2025). *Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru?* 2(April). <https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.134>
- Desalegn, T. A., Gebremedhin, S., Alemayehu, F. R., & Stoecker, B. J. (2021). *The effect of school feeding programme on class absenteeism and academic performance of schoolchildren in Southern Ethiopia: a prospective cohort study.* 24(10), 3066–3074. <https://doi.org/10.1017/S1368980021000501>
- Dieu, H., Theogene, H., Ngendahayo, E., Mugiraneza, F., Abdou, M., Emmanuel, N., & Ke, Z. (2023). School Feeding Programme Implementation and its Challenges in Basic Education Schools in Rwanda. *African Educational Research Journal*, 11, 338–350. <https://doi.org/10.30918/AERJ.113.23.037>
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif.* 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Impacts, H., The, O. F., On, P., & Communities, U. (n.d.). *Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan A COMPREHENSIVE STUDY ON MBG ( MAKAN BERGIZI GRATIS ) IN THE*

*PRABOWO-GIBRAN CABINET: EVALUATING THE PSYCHOLOGICAL AND HEALTH IMPACTS OF THE POLICY ON.* 177–186.

- Mubarok, S., Zauhar, S., & Setyowati, E. (2020). *Journal of Public Administration Studies Policy Implementation Analysis : Exploration of George Edward III , Marilee S Grindle , and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle.* 5(1), 33–38.
- Nissa, A., Candra, M., Humairoh, T., & Gusyuliandari, S. (2025). *Kebijakan Makanan Bergizi Gratis : Analisis Ekonomi Politik dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus : SMP Negeri 4 Tanjungpinang.* 2(June), 33–37.
- Prihatin, P. S., Wicaksono, A., & Riau, I. (2021). *GRINDLE POLICY IMPLEMENTATION THEORY IN ANALYSIS OF FORESTRY CONFLICT IN PELALAWAN DISTRICT , RIAU PROVINCE.* 7, 31–44.
- Sari, N. H., Lionardo, A., Thamrin, M. H., Putra, R., & Akbar, D. (2025). *Advances in Consumer Research Policy Learning And Implementation Of Free School Meal Programs In Indonesia : A Systematic Literature Review On Nutritional Policies , Cross- National Knowledge Transfer , And Local Adaptations .* 6, 474–481.
- Suprpto, F. A., Praditya, E., Dewi, R. M., & Adiyoso, W. (2025). *A Policy Implementation Review of the Free Nutritious Meal ( MBG ) Program.* 6(2), 297–312. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i2.798>.